



Asap Masih Mengepung Palangka Raya

Seorang wanita mengenakan masker saat mengendarai sepeda di tengah kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan di Jembatan Kahayan, Palang Karaya, Kalimantan Tengah, Selasa (7/10). Kabut asap berbahaya masih menyelimuti sejumlah wilayah Indonesia, Malaysia, dan Singapura selama berminggu-minggu. Pemerintah terus berupaya memadamkan kebakaran yang menghanguskan lahan luas di Kalimantan dan Sumatra, sementara asap terbawa angin hingga ke sejumlah wilayah di kawasan tersebut. Bahkan Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menyarankan sekolah-sekolah di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. (ist.afp)

DEFISIT APBN (DES 2025-SEP 2026)

Desember 2025

Nilai Defisit

Rp 695,1 triliun (2,92%)

Januari 2026

Nilai Defisit

Rp 54,6 triliun (0,21%)

Februari 2026

Nilai Defisit

Rp135,7 triliun (0,50%)

SESAK APBN KITA

Defisit Diproyeksikan 2,85%, Belanja Perjalanan Dinas Dipangkas 30%

APBN Indonesia mulai terasa makin sesak. Defisit telah mencapai Rp319 triliun hingga akhir September 2026 atau 1,24 persen PDB, sementara proyeksi akhir tahun 2,85 persen membuat ruang fiskal kian tipis menuju batas 3 persen. Pemerintah pun mulai menginjak rem dengan memangkas anggaran perjalanan dinas 30 persen dan membekukan belanja non-esensial. Di tengah ruang fiskal yang menyempit, pemerintah tetap dituntut mempercepat belanja pada November-Desember untuk menjaga pertumbuhan dan perlindungan masyarakat. Tekanan itu hadir bersamaan dengan tanda-tanda kehati-hatian rumah tangga. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) September turun tipis menjadi 118,1 dari 118,5 pada Agustus, meski masih berada di zona optimistis. Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini melemah dari 109,4 menjadi 107,5, sementara ekspektasi justru menguat dari 127,6 menjadi 128,7. Porsi pendapatan untuk konsumsi naik menjadi 74,9 persen, sedangkan tabungan turun menjadi 15,4 persen. Di titik ini, fenomena downgrading yaitu memilih barang, layanan, atau gaya konsumsi yang lebih murah, patut menjadi sinyal. Bukan dibaca semata-mata perubahan selera atau pilihan gaya hidup, tapi sebagai respons dan tanda bila rumah tangga menghadapi ketidakpastian ekonom. BERSAMBUNG HAL.11

Maret 2026

Nilai Defisit

Tidak dirinci (0,93%)

April 2026

Nilai Defisit

Rp164,4 triliun (0,64%)

Mei 2026

Nilai Defisit

Tidak dirinci (-)

Juni 2026

Nilai Defisit

Tidak dirinci (0,76%)

Agustus 2026

Nilai Defisit

Rp240,1 triliun (0,93%)

September 2026

Nilai Defisit

Rp319,0 triliun (1,24%)

PEMERINTAH KAJI SISWA

TAK LAGI OTOMATIS NAIK KELAS MULAI 2027

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) membuka opsi mengembalikan kebijakan tidak naik kelas mulai tahun ajaran 2027. Kebijakan itu akan mengakhiri praktik kenaikan kelas yang selama ini dipersepsikan berlangsung otomatis setelah siswa menyelesaikan satu tahun pembelajaran. PGRI mendukung, tetapi meminta asesmen dan pendampingan diperkuat.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan gagasan tersebut merupakan masukan Dewan Pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Pemerintah belum mengambil keputusan final karena masih membutuhkan kajian akademik dan masukan para ahli.

"Kalau ini disetujui dan mungkin menjadi bagian dari rekomendasi konvensi ini, tentu kami akan siap melaksanakan," kata Mu'ti dalam siaran pers, Kamis (8/10/2026).

Mu'ti menyebut, jika disetujui, kebijakan itu berpotensi berlaku mulai tahun ajaran 2027 dan seterusnya. Artinya, siswa tidak lagi otomatis melanjutkan ke kelas berikutnya hanya karena telah menyelesaikan satu tahun pembelajaran.

Gagasan tersebut pertama kali mengemuka dalam Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) XII 2026 di Bali. Mu'ti mengatakan pemerintah memperoleh masukan dari Dewan Pendidikan agar kebijakan tidak naik kelas kembali diberlakukan.

Alasan yang dikemukakan Mu'ti berkaitan dengan budaya belajar siswa. Ia menyoroti fenomena yang disebutnya sebagai "rumus RMS", yakni "rajin malas sama saja". Menurut dia, kondisi tersebut tidak sehat apabila berkembang menjadi budaya di sekolah.

"Karena banyak murid itu yang mengikuti rumus RMS, rajin malas sama saja," kata Mu'ti.

Menurut Mu'ti, siswa yang rajin belajar, memiliki motivasi dan menunjukkan perkembangan kompetensi semestinya memperoleh apresiasi sesuai capaian mereka. Sebaliknya, siswa yang belum memenuhi kompetensi tidak semestinya otomatis dianggap siap melanjutkan ke tingkat berikutnya.

Namun, Mu'ti menegaskan bahwa kebijakan tidak naik kelas tidak dimaksudkan semata-mata sebagai hukuman. Kebijakan tersebut, menurut dia, diarahkan untuk membangun karakter, kesungguhan belajar dan budaya berkompetisi.

Ia mengaitkan gagasan tersebut dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya membangun sumber daya manusia yang tangguh. Pendidikan, kata Mu'ti, tidak cukup hanya menghasilkan siswa dengan kemampuan akademik, tetapi juga harus membentuk generasi



(Ilustrasi) Siswa sedang mengambil MBG dengan konsep prasmanan yang baru diujicobakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ujungnegero, di SMP Negeri 2 Kandeman. (Dok)

yang memiliki daya juang dan siap menghadapi kompetisi.

"Saya setuju, mereka harus kita biasakan punya jiwa kelas. Yang rajin belajar, kemudian siap untuk berkompetisi, dan anak-anak yang tangguh seperti yang sering disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto," ujar Mu'ti.

Dalam kesempatan lain pada Kamis (8/10), Mu'ti memastikan apabila kebijakan tersebut diterapkan, cakupannya tidak hanya sekolah negeri. Sekolah swasta juga akan masuk dalam kebijakan tersebut.

"Semua sekolah baik negeri maupun swasta," kata Mu'ti. Ia menambahkan bahwa kebijakan tersebut masih dalam proses pengkajian.

PGRI: Kenaikan Kelas Berbasis Kompetensi

Wacana tersebut mendapat dukungan dari Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI). Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi menilai kenaikan kelas perlu mempertimbangkan penguasaan kompetensi dan capaian pembelajaran siswa.

"Saya kira kita harus menyambut baik ya. Kalau pendidikan kan bukan hasil yang tampak kelihatan langsung. Kemarin itu semua harus naik, tahu dampaknya kan banyak anak-anak SMA atau apa enggak bisa membaca," kata Unifah, Kamis (8/10).

Menurut Unifah, siswa yang belum mencapai kompetensi yang ditetapkan seharusnya mendapat kesempatan memperbaiki kemampuan sebelum melanjutkan ke kelas berikutnya.

"Jadi, tetap yang namanya kompetensi itu, penguasaan capaian

pembelajaran tuh tetap perlu diperlukan. Sehingga harus ada yang tidak naik kelas kalau belum (atau) tidak tercapai gitu," ujarnya.

Bagi Unifah, mekanisme kenaikan kelas juga berkaitan dengan motivasi belajar. Siswa perlu memahami bahwa hasil yang diperoleh berkaitan dengan proses dan upaya yang dilakukan.

"Perlunya pendidikan tuh kan enggak semua memberikan kesempatan. Harus, karena harus ada juga semangat, motivasi anak untuk belajar. Semangat motivasi itu adalah kalau kita sesuai dengan upaya kita, hasil kita," kata dia.

PGRI juga mengingatkan bahwa perubahan kebijakan tidak boleh mengembalikan pola penilaian yang hanya berorientasi pada hafalan. Unifah menilai asesmen seharusnya mengukur kemampuan siswa menerapkan pengetahuan dan menyelesaikan persoalan dalam kehidupan nyata.

"Jadi, bukan sekadar, 'Ooh, saya tahu bisa hafal semuanya.' Tapi bagaimana si anak itu bisa membacakan, bisa mengetahui sesuatu yang lebih penting di dalam hidupnya, ada relasinya dengan dunia nyata," ujarnya.

Unifah juga menyoroti persoalan yang muncul ketika seluruh siswa diarahkan untuk naik kelas. Menurut dia, dalam praktiknya guru dapat menghadapi tekanan orang tua ketika seorang siswa dinilai belum memenuhi syarat.

"Kalau enggak diluluskan nanti sama orang tuanya. Ada sebagian ya yang enggak mau terima, sebagian orang tua yang mengerti bahwa anaknya tidak eligible karena aturan, guru kan akhirnya meloloskan semua," katanya.

EVOLUSI SISTEM NAIK KELAS DI INDONESIA

1. Orde Lama & Baru (1947-1998)

- **Sistem kaku:** Nilai di bawah standar bisa membuat siswa tinggal kelas.
- **1978:** Tahun ajaran bergeser Januari → Juli.
- **1994:** Sistem caturwulan, kenaikan berdasarkan akumulasi nilai.

2. KTSP & Kurikulum 2013 (2006-2021)

- **Sistem KKM:** Tiap sekolah memiliki standar ketuntasan.
- **Rapor:** Maksimal 3 mapel tidak tuntas.
- **Sikap:** Nilai sikap buruk dapat memengaruhi kenaikan kelas.

3. Kurikulum Merdeka (2022-sekarang)

- **Sistem fase:** Pembelajaran dikelompokkan berdasarkan fase.
- **Naik kelas:** Tinggal kelas sangat dihindari.
- **Pendekatan:** Siswa tetap naik sambil mendapat pendampingan.

4. Wacana Kebijakan 2027

- **Tidak otomatis naik:** Syarat kenaikan dikaji ulang.
- **Uji kompetensi:** Penguasaan materi menjadi perhatian.
- **Tujuan:** Mendorong motivasi dan daya juang belajar.



Situasi tersebut, menurut Unifah, membuat kenaikan kelas berisiko tidak lagi mencerminkan kemampuan siswa.

"Karena aturannya harus lulus semua, ya udah, naik. Enggak usah ada proses pembelajaran, enggak usah ada assessment lagi kalau gitu. Enggak usah ada penilaian lagi. Ya udah aja naik semua," ujar dia.

Karena itu, Unifah mendukung peninjauan kembali sistem kenaikan kelas otomatis. Namun, ia meminta pemerintah sekaligus memperbaiki sistem asesmennya agar penilaian tidak sekadar menguji hafalan, melainkan kemampuan berpikir dan memecahkan masalah. (tin ist,kum/dya)

Wacana Tambah 11 Kursi DPR Muncul dalam Pembahasan RUU Pemilu

Wacana penambahan jumlah anggota DPR mulai mengemuka dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima menyebut ada usulan menambah hingga 11 kursi untuk Pemilu 2029, terutama dengan mengubah ketentuan daerah pemilihan (dapil) yang saat ini memiliki alokasi minimal tiga kursi.

Gagasan itu dibahas Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu bersama Badan Keahlian DPR (BKD) pada Kamis (8/10/2026). Aria mengatakan penambahan kursi dipertimbangkan untuk memperkuat keterwakilan wilayah, terutama di daerah luar Jawa yang memiliki karakter geografis berbeda dengan Jawa.

"Itu yang mungkin rasionalisasi mungkin ada 11 kursi tambahan dari yang tiga, gitu loh," kata Aria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Menurut Aria, desain keterwakilan anggota DPR tidak semata-mata dapat dihitung berdasarkan jumlah penduduk. Kondisi geografis dan luas wilayah, terutama di daerah kepulauan, juga perlu diperhitungkan. Ia membandingkan karakter keterwakilan di Jawa dengan wilayah luar Jawa.

"Untuk lebih memperkuat karena wilayah laut ya kebanyakan, ya, yang tiga tiga ini kan, kan ini nggak bisa one man vote. Vote-nya di Jawa kayak saya ini kan mahal, ya, sama Papua kan beda. Konsepsinya beda, satu kursinya di Jawa ini keterwakilan orang, kalau di luar Jawa kan tidak hanya keterwakilan orang, NKRI-nya kan keterwakilan wilayah juga," ujarnya.

Aria menyebut pertimbangan tersebut berkaitan dengan prinsip keadilan dalam menentukan alokasi kursi setiap dapil. Menurut dia, sistem pemilu perlu menggabungkan proporsionalitas keterwakilan penduduk dengan keterwakilan wilayah sebagai bagian dari desain negara kesatuan. "Ini yang yang bicara prinsip keadilan di dalam merumuskan jumlah kursi per dapil itu juga penguatan dalam negara kesatuan, tidak hanya soal proporsionalitas representatif manusia," katanya.

Usulan tersebut muncul bersamaan dengan pembahasan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Panja RUU Pemilu sebelumnya membuka berbagai kemungkinan mengenai besaran ambang batas, dari 0 hingga 20 persen, dengan catatan setiap angka harus memiliki dasar argumentasi konstitusional. Ketua Panja

RUU Pemilu Rifqinizamy Karsayuda menegaskan angka threshold tidak boleh sekadar lahir dari kompromi politik.

Pembahasan desain jumlah kursi juga dikaitkan dengan efektivitas kerja parlemen. Saat ini DPR memiliki 580 anggota dan 13 komisi sebagai alat kelengkapan utama yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Aria menilai kapasitas kerja komisi juga perlu diperhitungkan ketika desain parlemen disusun.

"Kalau sekarang ini 13 komisi yang efektif berapa? Kalau dua kelabakan, karena masih ada badan, masih ada pansus. Kalau tiga, kali 13 gitu, kan? 39. 39 dari 50,580," kata dia.

Anggota Komisi II DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia memberikan penjelasan lebih rinci mengenai skema penambahan tersebut. Ia mengatakan terdapat pembahasan agar tidak lagi ada dapil DPR dengan hanya tiga kursi. Jika batas minimal dinaikkan menjadi empat kursi, jumlah kursi DPR berpotensi bertambah 11 sehingga menjadi 591 kursi.

"Selama ini kan minimal satu dapil kan tiga. Kami sepakat empat. Nah itu, selama ini ada 11 dapil yang kursinya tiga. Jadi kalau jadi naik empat, sudah

nambah 11 kursi, dari 580 tambah 11 jadi 591," ujar Doli, Kamis.

Selain perubahan batas minimal kursi per dapil, Doli menyebut jumlah kursi DPR juga dapat berubah akibat penyesuaian alokasi berdasarkan perkembangan jumlah penduduk. Jawa Barat, misalnya, mengalami pertumbuhan penduduk sehingga perubahannya dapat berkonsekuensi pada alokasi kursi DPR. Ia juga menyebut adanya kajian mengenai kemungkinan pembentukan dapil nasional yang dapat memengaruhi desain kursi parlemen.

Untuk saat ini, ketentuan UU Pemilu menetapkan alokasi kursi DPR dalam satu dapil berada pada rentang tiga hingga 10 kursi. Pada Pemilu 2024, jumlah kursi DPR meningkat menjadi 580 dari sebelumnya 575, sementara jumlah dapil bertambah menjadi 84 setelah pembentukan empat daerah otonomi baru di Papua, masing-masing memperoleh tiga kursi DPR.

Aria menegaskan penambahan kursi belum menjadi keputusan. Menurut dia, angka 11 tersebut masih berupa masukan dari BKD yang sedang dibahas dalam Panja RUU Pemilu.

"Belum ada, ini baru masukan dari badan keahlian," kata Aria. (tin,ist,ant/dya)

Jokowi soal Pemakzulan Gibran: Ikuti Mekanisme Konstitusi

Presiden ke-7 RI Joko Widodo meminta wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditempuh melalui mekanisme demokrasi dan konstitusi. Pernyataan itu disampaikan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan terkait sengketa pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

"Silakan ikuti mekanisme demokrasi yang tersedia yang sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan aturan hukum yang ada," kata Jokowi di Solo, Kamis (8/10/2026).

Jokowi mengatakan menghormati Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 beserta seluruh pertimbangan hukum yang menyertainya. Dalam putusan yang dibacakan pada Selasa (6/10), MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyertaan dengan

pendidikan minimal tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan UU Pemilu.

"Kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada, termasuk di dalamnya pertimbangan hukum yang diberikan," ujar Jokowi.

Meski demikian, MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Mahkamah menilai perkara tersebut tidak lagi tepat diselesaikan dalam rezim perselisihan hasil Pilpres karena Gibran telah dilantik dan disumpah sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Dalam amar putusan, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

Jokowi kemudian menjelaskan pandangannya mengenai dokumen pendidikan Gibran.

Menurut dia, sistem pendidikan di setiap negara dapat berbeda. Ada negara yang menggunakan tahapan pendidikan

seperti SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi, tetapi ada pula sistem pathway yang memungkinkan seseorang menempuh jalur pendidikan berbeda sebelum masuk ke jenjang diploma atau sarjana.

"Kalau kita tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri, ada yang seperti kita SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma, kemudian S1-nya," katanya.

Menurut Jokowi, Gibran telah menyelesaikan pendidikan jenjang sarjana. Karena itu, ia menilai putranya semestinya telah melewati jenjang pendidikan sebelumnya.

"Kalau menyelesaikan S1 itu kan mestinya sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya," ujarnya.

Joko Widodo
Presiden ke-7 RI

Persoalan tersebut menjadi sorotan setelah MK dalam pertimbangannya menyebut tidak menemukan bukti yang meyakinkan mengenai dokumen pendidikan Gibran yang menunjukkan penyelesaian pendidikan luar negeri setara SMA. Mahkamah juga menilai certificate of attendance, catatan akademik, dan dokumen lain yang terungkap dalam persidangan tidak menerangkan keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan menunjukkan kehadiran dalam proses pembelajaran. (wid,ant/dya)



RUMAH DINAS TNI DI CIJANTUNG DIDUGA JADI MARKAS JUDOL, 11 ORANG DIAMANKAN

Dugaan rumah dinas di Kompleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Cijantung, Jakarta Timur, dijadikan tempat operasional judi online (judol) memasuki tahap pemeriksaan. TNI Angkatan Darat mengamankan 11 warga sipil dari rumah tersebut beserta 32 unit komputer, 14 telepon seluler, dan sembilan kartu tanda penduduk (KTP).



Suasana markas yang ditengarai sebagai markas admin judi online dalam video yang beredar di sosial media. (IST)

Pengungkapan kasus bermula dari laporan warga yang mencurigai adanya aktivitas tidak wajar di salah satu rumah di kompleks tersebut. Personel Kodim 0505/Jakarta Timur bersama unsur kewilayahan kemudian mendatangi lokasi pada Minggu (4/10) dan mengamankan rumah serta sejumlah barang bukti untuk diperiksa lebih lanjut.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono mengatakan petugas menemukan banyak komputer di sejumlah ruangan. Perangkat tersebut diduga digunakan untuk mengoperasikan sistem judi online. Sebelas orang yang berada di dalam rumah turut diamankan dan dibawa ke Detasemen Polisi Militer (Denpom) untuk menjalani pemeriksaan.

"Dari 11 orang yang diamankan, seluruhnya merupakan warga sipil yang terdiri atas enam laki-laki dan lima perempuan. Selanjutnya dibawa ke Denpom untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman terkait aktivitas yang dilakukan di lokasi tersebut," kata Donny, Kamis (8/10).

Selain 11 orang tersebut, aparat menyita 32 unit komputer, 14 telepon seluler, dan sembilan KTP. Lokasi juga diamankan untuk kepentingan pemeriksaan. TNI AD belum mengungkap peran masing-masing orang yang diamankan maupun sejak kapan aktivitas yang diduga berkaitan dengan judol itu berlangsung.

Kasus ini menjadi sorotan setelah

video penggerebekan rumah tersebut beredar di media sosial. Dalam rekaman yang beredar, terlihat sejumlah orang berada di sebuah ruangan yang dipenuhi komputer. Perekam video menduga ruangan itu digunakan untuk aktivitas judi online. TNI kemudian menyatakan informasi tersebut sedang didalami dan sejumlah pihak diperiksa, termasuk kemungkinan pihak internal TNI.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Muhammad Nas mengatakan pemeriksaan akan dilakukan terhadap pihak yang dinilai berkaitan dengan perkara. "Semua yang dinilai perlu untuk kepentingan penyelidikan pasti diperiksa," kata Nas, Kamis (8/10). Ia menegaskan proses pemeriksaan masih berjalan. "Dalam pemeriksaan dan sedang didalami. Bila terbukti pasti ada sanksi sesuai undang-undang yang berlaku."

Sebelumnya, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan tidak akan memberikan toleransi jika ditemukan anggota TNI AD yang terlibat atau menjadikan rumah dinas sebagai tempat kegiatan ilegal. Pernyataan itu disampaikan Maruli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/10).

"Pokoknya, kalau ada laporan, kita pasti tindak tegas. Kalau kita, pasti respon cepat," kata Maruli. Ia kembali menegaskan respons TNI AD terhadap laporan pelanggaran akan dilakukan secara cepat. "Sudah pasti cepat, kalau kita cepat lah."

TNI AD menyatakan pengungkapan tersebut merupakan

bagian dari upaya mencegah fasilitas di lingkungan TNI digunakan untuk aktivitas ilegal. "TNI AD juga tidak akan membiarkan fasilitas yang berada dalam lingkungannya digunakan untuk kegiatan ilegal yang merugikan masyarakat," ujar Donny.

Hingga Kamis (8/10), belum ada keterangan resmi mengenai status hukum 11 warga sipil tersebut maupun hasil pemeriksaan terhadap pihak lain yang berkaitan dengan penggunaan rumah tersebut. TNI masih mendalami siapa saja yang terlibat, bagaimana rumah itu dapat digunakan untuk aktivitas tersebut, serta proses hukum yang akan ditempuh selanjutnya.

DPR Minta TNI Lakukan Audit

Dugaan penyalahgunaan fasilitas perumahan militer untuk aktivitas judi online mendorong Komisi I DPR meminta TNI membenahi sistem pengawasan internal. Legislator menilai persoalan tersebut tidak cukup berhenti pada penindakan terhadap pihak yang diduga terlibat, tetapi juga perlu ditelusuri dari sisi tata kelola fasilitas milik negara.

Anggota Komisi I DPR Taufiq R. Abdullah meminta Markas Besar TNI mengusut perkara tersebut secara menyeluruh. Menurut dia, penyelidikan harus menjawab bagaimana fasilitas di lingkungan militer dapat digunakan untuk aktivitas yang diduga melanggar hukum.

"Kami meminta TNI melakukan

pengusutan secara tuntas dan menyeluruh terhadap dugaan adanya markas judol di KPAD Cijantung," kata Taufiq dalam keterangan tertulis, Kamis (8/10).

Taufiq meminta TNI mengevaluasi mekanisme pengawasan terhadap kompleks perumahan prajurit. Ia menilai ada sejumlah pertanyaan yang harus dijawab dalam penyelidikan, termasuk pihak yang menggunakan fasilitas, pemberi akses, serta bagaimana aktivitas tersebut dapat berlangsung di lingkungan militer.

"Harus dipastikan siapa yang menggunakan, siapa yang memberi akses, dan bagaimana aktivitas itu bisa berlangsung di kompleks TNI," ujarnya.

Menurut Taufiq, persoalan tersebut juga menyentuh tata kelola aset negara. Rumah dinas militer, kata dia, dibangun menggunakan anggaran negara untuk menunjang kebutuhan kedinasan dan tempat tinggal prajurit yang berhak.

Karena itu, ia menilai rumah dinas tidak semestinya dialihfungsikan menjadi tempat usaha, terlebih untuk kegiatan yang bertentangan dengan hukum.

"Rumah dinas itu bukan ruang usaha bebas dan bukan tempat untuk menjalankan kegiatan ilegal. Kalau dialihfungsikan untuk kegiatan yang melanggar hukum, harus ditelusuri siapa yang bertanggung jawab," kata politikus PKB tersebut.

Taufiq juga meminta pimpinan TNI menjadikan perkara ini sebagai bahan evaluasi pengelolaan rumah dinas secara lebih luas. Ia mendorong audit berkala terhadap penghuni dan penggunaan fasilitas perumahan prajurit, termasuk memperkuat



MARULI SIMANJUNTAK

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI

PEMBEBASAN BERSYARAT BECHI DICABUT, 6 PETUGAS DIPERIKSA

Mochamad Subchi Azal Tsani alias Bechi kembali menjalani hukuman di Lapas Kelas I Malang, Jawa Timur, setelah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Kemenimipras) mencabut pembebasan bersyarat terpidana kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di Pesantren Shiddiqiyah, Jombang. Disebut pemerintah menemukan masalah dalam proses teesebut dan kini enam petugas pemasarakatan diperiksa.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Ditjenpas) Jawa Timur Kusnali mengatakan Bechi telah kembali ke Lapas Kelas I Malang pada Kamis (8/10/2026). Ia tiba pukul 11.25 WIB dan menjalani pemeriksaan, pendataan administratif, serta pengamanan sebelum kembali mengikuti pembinaan.

"Setibanya di lapas pukul 11.25 WIB, [hari ini], MSA [Bechi] menjalani pemeriksaan, pendataan administratif, dan pengamanan, sebelum kembali mengikuti pembinaan," kata Kusnali, Kamis (8/10).

Pencabutan tersebut merujuk Surat Keputusan Nomor PAS-1797.PK.07.04 Tahun 2026 tertanggal 30 September 2026. Surat itu diterima Kanwil Ditjenpas Jawa Timur pada 6 Oktober 2026. Kepala Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas I Malang Fathorrosi mengatakan surat pencabutan juga telah disampaikan langsung kepada Bechi saat menjalani kewajiban laporan.

"Pada hari ini yang bersangkutan klien atas nama Bechi melakukan wajib lapor. Sekaligus disampaikannya SK itu terhadap klien secara persuasif," ujar Fathorrosi.

Setelah surat tersebut disampaikan, Bechi langsung diantar kembali ke Lapas Kelas I Malang.

"Dan hari ini juga yang bersangkutan langsung kami antar ke Lapas Malang yang dibantu oleh petugas dari Lapas," katanya.

Pemerintah Temukan Maladministrasi

Kusnali mengatakan pencabutan pembebasan bersyarat dilakukan setelah pemerintah menemukan adanya masalah dalam proses pemberian hak tersebut. Ia menyebut terdapat indikasi maladministrasi sehingga keputusan pembebasan bersyarat Bechi dicabut.

"Terindikasi ada maladministrasi sehingga pimpinan mengambil kebijakan untuk dilakukan pencabutan," ujar Kusnali.

Pemerintah kemudian membentuk tim pemeriksaan. Sebanyak enam petugas, terdiri atas



Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur, Kusnali, menunjukkan foto Bechi kembali dipenjara di Lapas I Malang. (ist)

lima pegawai Lapas Kelas I Malang dan satu pegawai Bapas Kelas I Malang, telah menjalani pemeriksaan awal oleh Kanwil Ditjenpas Jawa Timur.

Pemeriksaan selanjutnya diambil alih Inspektorat Jenderal Kemenimipras.

"Dan, sekarang diambil alih oleh tim Inspektorat. Kita menunggu hasil dari tim Inspektorat seperti apa," kata Kusnali.

Ia memastikan pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai aturan disiplin.

"Terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran, akan diberikan tindakan sesuai aturan disiplin," ujarnya.

Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Agus Andrianto sebelumnya menyatakan pembebasan bersyarat Bechi memang harus dicabut setelah evaluasi internal menemukan kesalahan dalam proses pemberiannya.

"Wajib dicabut [pembebasan bersyarat Bechi]. Kalau tidak, UPT dan Kanwil akan kena sama Irjen," kata Agus, Rabu (7/10).

Agus juga menyatakan pihak yang dianggap melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi. Menteriannya, kata dia, akan mengevaluasi mekanisme pemberian pembebasan bersyarat agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.

Bechi Divonis 7 Tahun

Bechi merupakan putra kiai Muhammad Mukhtar Mukthi, pendiri Pesantren Shiddiqiyah di Jombang.

Pengadilan Negeri Surabaya pada November 2022 menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara terhadap Bechi dalam perkara kekerasan seksual. Putusan itu lebih ringan daripada tuntutan jaksa yang mencapai 16 tahun penjara.

Berdasarkan vonis tujuh tahun tersebut, Bechi seharusnya menyelesaikan masa hukumannya pada 2029. Ia baru diperkirakan mencapai dua pertiga masa pidana sekitar Maret 2027.

Namun, Kemenimipras sebelumnya menyatakan Bechi mendapatkan program pembebasan bersyarat pada 15 Agustus 2025. Pemerintah ketika itu menjelaskan Bechi telah mencapai dua pertiga masa pidana pada 23 Juli 2025 setelah memperoleh sejumlah remisi.

Ditjenpas pada September lalu menyatakan pembebasan bersyarat diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan syarat yang harus dipenuhi narapidana. Bechi disebut memenuhi persyaratan setelah menjalani pembinaan dan dinilai menunjukkan perubahan perilaku.

Namun, polemik muncul setelah investigasi BBC Eye mengungkap Bechi telah berada di luar penjara. Pemerintah kemudian menyatakan akan memeriksa proses pemberian pembebasan bersyarat tersebut.

FP, salah satu penyintas kasus kekerasan seksual yang melibatkan terpidana Moch Subchi Azal Tsani alias Bechi, mengungkap dampak lain yang mereka alami setelah keluar dari Pondok Pesantren Shiddiqiyah,

TIMELINE DRAMA BEBAS BERSYARAT BECHI

JULI 2022: Drama Pengepungan

- 7 Juli: Dikepung 15 jam oleh 1.000 polisi di pesantren, Bechi akhirnya menyerah.
- 8 Juli: Resmi ditahan atas kasus kekerasan seksual santriwati.

NOVEMBER 2022: Vonis Ringan

- 17 November: Divonis 7 tahun penjara oleh PN Surabaya (jauh di bawah tuntutan jaksa 16 tahun).

AGUSTUS 2025: Bebas Diam-Diam

- 20 Agustus: Keluar dari Lapas Malang lewat Bebas Bersyarat (PB).
- Hanya dipenjara 3 tahun 1 bulan karena mendapat total remisi 19 bulan.

SEPTEMBER 2026: Skandal Terbongkar

- Investigasi media membongkar kebebasan rahasia Bechi. Publik & DPR meradang.
- Menteri Imigrasi & Pemasarakatan menyatakan proses PB cacat prosedur.

OKTOBER 2026: Resmi Dijebloskan Lagi

- Hak Bebas Bersyarat Dicabut Resmi!
- Bechi diperintahkan kembali masuk penjara untuk habiskan sisa hukuman hingga 2029.



Jombang. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Rabu (7/10/2026), FP mengatakan ijazah yang diperolehnya dari pesantren tidak memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), sehingga menyulitkannya melanjutkan pendidikan maupun mencari pekerjaan formal. (gus,ist,ton/dya)

Pilkades 2027, Pemkab Malang Buka Peluang e-Voting

MALANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang membuka opsi pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) secara elektronik atau e-voting pada 2027 mendatang. Namun, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang, Nurcahyo, menegaskan penerapannya hanya akan ditawarkan kepada desa yang dinilai siap.

"Sampai saat ini kami belum melakukan pengenalan kepada desa berkaitan dengan e-voting itu. Tetapi nanti kami akan coba tawarkan kepada desa-desa yang sudah siap saja," ujar Nurcahyo, Kamis (8/10/2026).

Ditegaskannya penerapan e-voting pada Pilkades serentak di 2027 tidak serta-merta dilakukan di seluruh desa Kabupaten Malang. Sebab, jumlah desa yang akan melaksanakan Pilkades diperkirakan mencapai sekitar 210 desa.

Karena itu, pihaknya masih akan melihat komitmen dan kesiapan masing-masing desa sebelum menentukan desa mana yang dapat menerapkan mekanisme pemungutan suara secara elektronik.

Nurcahyo menjelaskan, pelaksanaan Pilkades 2027 saat ini diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp28 miliar. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Malang, tetapi mekanisme pengalokasiannya masuk melalui APBDDes.

Dengan mekanisme tersebut, pengadaan kebutuhan pelaksanaan Pilkades, termasuk apabila menggunakan jasa penyedia e-voting, nantinya dilakukan oleh pemerintah desa sesuai ketentuan pengadaan yang berlaku.

Ia mengatakan, DPMD juga telah memperoleh informasi dari sosialisasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai adanya lembaga penyedia jasa yang dapat mendampingi pelaksanaan e-voting.

Lembaga tersebut diketahui telah memiliki pengalaman mendampingi pelaksanaan e-voting di sejumlah desa di Indonesia. Pendampingan juga akan berlanjut ketika terdapat persoalan atau sengketa setelah pelaksanaan Pilkades.

Namun, hingga kini pihaknya mengaku belum menentukan estimasi jumlah desa yang akan menggunakan

mekanisme tersebut. Menurut Nurcahyo, setiap lokasi pelaksanaan e-voting nantinya harus memiliki antisipasi apabila terjadi gangguan listrik, termasuk dengan menyiapkan genset sebagai sumber listrik cadangan.

"Tantangannya harus diantisipasi agar pelaksanaannya tidak ada gangguan sama sekali," katanya.

Lebih lanjut terkait sisi pelaksanaan, Nurcahyo menilai salah satu keuntungan e-voting adalah proses rekapitulasi suara yang dilakukan secara elektronik. Dijelaskannya, sejumlah tahapan Pilkades seperti pendataan daftar pemilih tetap hingga pemungutan suara dilakukan secara elektronik.

Selain itu, ia menilai sistem elektronik dapat membantu mendeteksi apabila terjadi dugaan

Ilustrasi: Pelaksanaan Pilkades menggunakan skema e-voting di Indonesia.
(foto: Dirjen Dukcapil Kemendagri RI)



manipulasi karena mekanisme pemungutan dan penghitungan suara telah diprogram dalam sistem.

"Justru kalau menurut saya akan bisa dideteksi dari sistemnya kalau memang ada manipulasi. Karena itu sudah terprogram, penyediaannya nanti yang bertanggung jawab, mendampingi panitia," katanya. (Santi/Dya)

Soal Lahan UM Dipakai 3 Sekolah, Pemkot Malang Siapkan Skenario Tukar Guling



Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat. (Santi/Lentera)

MALANG- Masa pinjam pakai lahan Universitas Negeri Malang (UM) yang digunakan 3 sekolah negeri di kawasan Sumbersari, akan berakhir pada 2027. Mengantisipasi berakhirnya kerja sama tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mulai menyiapkan sejumlah skenario, termasuk opsi tukar guling.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengatakan, masa pinjam pakai lahan tersebut semula berakhir pada 2026, namun telah disepakati untuk diperpanjang hingga April 2027. "Itu kesepakatan bersama antara kami dengan pihak UM, terakhir memang sampai dengan 2027. Nanti kami akan koordinasi kembali," ujar Wahyu, dikutip pada Kamis (8/10/2026).

Adapun tiga sekolah yang dimaksud, yakni SDN Sumbersari 3, SDN Percobaan 1, dan SMPN 4 Kota Malang.

Menurutnya, Pemkot Malang telah menyusun sejumlah pertimbangan apabila 3 sekolah tersebut nantinya harus direlokasi. Namun, Pemkot masih berharap UM dapat memberikan kebijakan yang memungkinkan sekolah tetap berada

di lokasinya saat ini.

Dalam kesempatannya, Wahyu menyebut, opsi tukar guling juga masuk dalam skenario yang tengah dipertimbangkan. Pemkot Malang memiliki sejumlah lahan yang dapat ditawarkan apabila mekanisme tersebut memungkinkan dilakukan.

"Sehingga apabila nanti perlu ada tukar guling agar sekolahnya tetap di sana, kami ada lahan yang merupakan aset Pemkot kalau memang perlu ditukar guling. Itu termasuk skenario," katanya.

Diketahui, pemanfaatan lahan UM oleh SDN Sumbersari 3, SDN Percobaan 1, dan SMPN 4 Kota Malang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Status pinjam pakai lahan tersebut sejatinya berakhir pada Februari 2026.

Namun, melalui pembaruan kerja sama, Pemkot Malang masih dapat memanfaatkan lahan tersebut hingga April 2027 mendatang.

Sebelumnya, pihak UM sempat menyatakan tidak berencana

memperpanjang penggunaan lahan setelah masa pinjam pakai berakhir. Sikap tersebut berkaitan dengan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2019 yang mendorong optimalisasi pengelolaan aset negara, termasuk aset yang dimiliki perguruan tinggi negeri.

Dengan kondisi ini, Wahyu mengakui skenario jangka panjang perlu segera disiapkan. Sebab, perpanjangan pinjam pakai hingga 2027 dinilai baru menjadi solusi jangka pendek. "Kalau memang boleh itu tadi, kami ada beberapa skenario dengan kami menyediakan lahan di tempat lain yang nanti bisa menjadi asetnya UM," terang Wahyu.

Di sisi lain, Pemkot Malang mempertimbangkan dampak apabila relokasi sekolah benar-benar dilakukan. Menurut Wahyu, pemindahan sekolah berpotensi menambah beban bagi wali murid, terutama jika lokasi sekolah baru berada cukup jauh dari lingkungan tempat tinggal siswa. (Santi/Dya)

Demo Pelajar Prancis Masuk Pekan Ketiga 6.600 ORANG DITANGKAP, MELUAS KE BELGIA

Gelombang demonstrasi pelajar di Prancis memasuki pekan ketiga tanpa tanda-tanda segera berakhir. Pada Kamis (8/10/2026), pelajar kembali memblokade sejumlah sekolah dan turun ke jalan di berbagai kota. Sementara pemerintah belum memberikan rincian langkah konkret untuk memenuhi tuntutan mereka. Kementerian Dalam Negeri mencatat lebih dari 6.600 penangkapan sejak gelombang protes dimulai pada akhir September. Mayoritas yang ditangkap berusia di bawah 18 tahun. Pada Kamis, polisi kembali menggunakan gas air mata untuk membubarkan pelajar yang membuat barikade di sekitar Lycée Hélène Boucher, Paris.

Kementerian Pendidikan Prancis mencatat 224 sekolah menengah atas (SMA) tutup dan 151 lainnya mulai dibuka kembali secara terbatas. Secara keseluruhan, 94 persen SMA telah beroperasi penuh atau sebagian. Jumlah sekolah yang terdampak turun sekitar 30 persen dibandingkan sehari sebelumnya, tetapi aksi tetap berlangsung di Nantes, Rennes, Marseille, hingga Paris.

Aksi tersebut bermula dari keluhan pelajar mengenai kekurangan guru, kelas yang terlalu padat, serta kondisi bangunan dan fasilitas sekolah yang memburuk. Tuntutan kemudian berkembang menjadi desakan investasi lebih besar untuk pendidikan, perbaikan gedung sekolah, penambahan tenaga pendidik, serta perubahan sejumlah kebijakan yang dinilai membebani siswa.

Skala demonstrasi membesar setelah respons aparat terhadap aksi pelajar memicu kontroversi.

Penggunaan kekuatan oleh aparat menjadi salah satu isu paling sensitif dalam demonstrasi. Sejumlah pelajar mengalami cedera serius. Seorang remaja 15 tahun kehilangan satu tangan dalam insiden yang melibatkan granat kejut polisi di Lens. Remaja 14 tahun lainnya mengalami cedera parah pada wajah akibat granat gas air mata. Pemerintah kemudian menangguhkan penggunaan granat kejut dalam pengamanan demonstrasi. Sebanyak 18 penyelidikan internal terkait tindakan aparat juga dibuka.

Di tengah situasi tersebut, Wali Kota Saint-Denis Bally Bagayoko menjadi sorotan setelah video dirinya menghadang polisi saat demonstrasi di Paris viral. Bagayoko mengatakan ia berusaha mencegah polisi menyerbu pelajar yang menurutnya sebagian besar tidak menunjukkan perilaku agresif.

"Mereka telah memutuskan untuk menyerbu dan benar-benar mengejar para pelajar, yang banyak di antaranya sama sekali tidak menunjukkan perilaku agresif terhadap petugas polisi," kata Bagayoko kepada Reuters. Polisi kemudian menembakkan gas air mata ke kelompok tersebut, termasuk ke arah sang wali kota.

Bagayoko mengatakan pelajar yang berada di jalan mengingatkannya



Sejumlah demonstran pelajar bersama guru dan orang tua terlibat bentrokan dengan petugas kepolisian Prancis pada Kamis (8/10/2026) saat protes nasional atas kondisi pembelajaran. (afp)

pada anak-anaknya sendiri. "Anak-anak sekolah menengah yang berada di jalan bisa saja adalah anak-anak saya. Ini tanggung jawab saya untuk berada di sisi mereka," ujarnya. Ia menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan keamanan, melainkan membutuhkan investasi pendidikan yang lebih besar.

Perdana Menteri Sébastien

Lecornu berupaya meredakan ketegangan dengan menjanjikan respons yang konkret, cepat, dan memiliki pendanaan pada akhir Oktober. Namun, hingga Kamis pemerintah belum merinci besaran anggaran maupun program yang akan diberikan. Kondisi itu membuat sebagian pelajar tetap melanjutkan aksi.

Lecornu juga membantah bahwa

polisi diperintahkan untuk berkonfrontasi dengan pelajar. Pemerintah pada saat yang sama menyoroti kerusakan sejumlah sekolah dan tindakan kekerasan dalam demonstrasi.

Menteri Pendidikan Édouard Geffray sebelumnya menyebut 24 SMA mengalami kerusakan berat, yang berdampak pada sekitar 30.000 siswa. (gus,ist,rtr,afp/dya)

DARURAT PENDIDIKAN PRANCIS

Pemicu Utama

- **Krisis Guru:** Banyak kelas kosong tanpa guru pengganti.
- **Fasilitas Rusak:** Gedung sekolah terbengkalai dan kurang anggaran.
- **Kelas Padat:** Jumlah siswa melebihi kapasitas ruang kelas.

Demo dalam Angka

- **266.000+** Massa turun ke jalan di 40+ kota besar.
- **700+** Sekolah menengah terpaksa ditutup/diberhentikan.
- **6.500+** Orang ditangkap polisi (mayoritas anak di bawah umur).

Kronologi & Dampak

- **Pertengahan September:** Dimulai dari blokade SMA di pinggiran Paris (Seine-Saint-Denis).
- **Oktober:** Meluas secara nasional dengan dukungan guru, orang tua, dan serikat buruh.
- **Eskalasi:** Berujung bentrokan sporadis. Polisi menembakkan gas air mata; ratusan remaja dan aparat terluka.



dengan agenda agama atau identitas. Reuters mencatat tuntutan yang disuarakan berkaitan dengan kekurangan guru dan kondisi bangunan sekolah, sementara pemerintah telah berjanji menyiapkan respons yang konkret dan didanai pada akhir Oktober. (wud,ist,tmp/dya)

Trump Kaitkan dengan Islam dan Migrasi

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaitkan gelombang demonstrasi pelajar di Prancis dengan migrasi dan Islam. Pernyataan itu disampaikan ketika aksi pelajar memasuki pekan ketiga dan telah melibatkan ratusan sekolah di berbagai wilayah Prancis.

Trump menyampaikan klaim tersebut melalui Truth Social pada Selasa (6/10). Ia menyebut situasi di Prancis sebagai akibat dari "migrasi massal yang di luar kendali" dan menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan tentang sekolah. "Ini bukan tentang sekolah, ini tentang Islam yang ingin mengambil alih negara yang dulunya hebat," tulis Trump.

Trump tidak menyertakan bukti untuk mendukung klaim tersebut.

Sementara itu, laporan mengenai aksi di Prancis menunjukkan demonstrasi bermula dari tuntutan pelajar terhadap kondisi pendidikan, antara lain kekurangan guru, ruang kelas yang padat, serta buruknya fasilitas dan bangunan sekolah. Aksi kemudian meluas dan disertai bentrokan dengan aparat keamanan.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot menanggapi pernyataan Trump tanpa mengadopsi narasi mengenai Islam dan migrasi. Ia menegaskan Prancis perlu menjelaskan sendiri apa yang terjadi di dalam negerinya. "Jika kita tidak menulis kisah kita sendiri, orang lain akan menulisnya untuk kita," kata Barrot.

Sejauh laporan mengenai gerakan tersebut, tidak ditemukan kaitan antara tuntutan utama pelajar

Oseltamivir Sempat Langka Buntut Ledakan Flu, Kenali Fungsi dan Risikonya

Ketersediaan obat antivirus oseltamivir menjadi perhatian masyarakat menyusul meningkatnya kasus influenza A di Indonesia. Dalam beberapa hari terakhir September 2026, muncul laporan kesulitan memperoleh obat tersebut di sejumlah rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Kondisi ini memicu kekhawatiran masyarakat, terutama di tengah penyebaran informasi mengenai influenza di media sosial.

Pemerintah pun mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying. Sebab, oseltamivir bukan obat flu biasa yang bisa dikonsumsi setiap kali seseorang mengalami demam, batuk, dan pilek.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan ketersediaan obat tetap dipantau dan distribusinya dipercepat untuk memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan. Hingga 28 September 2026, distribusi oseltamivir telah menjangkau sekitar 196 rumah sakit dan akan dilanjutkan berdasarkan permintaan serta kebutuhan pasien.

Apa Itu Oseltamivir?

Oseltamivir merupakan obat antivirus yang digunakan untuk menangani infeksi influenza tipe A dan B. Obat ini bekerja dengan menghambat enzim neuraminidase, protein yang dibutuhkan virus influenza untuk melepaskan diri dari sel yang telah terinfeksi dan menyebar ke sel lainnya.

Mengutip Mayo Clinic dan Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Amerika Serikat, oseltamivir termasuk kelompok obat penghambat neuraminidase. Penggunaannya dapat membantu mengurangi keparahan gejala dan memperpendek durasi sakit apabila

diberikan pada waktu yang tepat. Gejala influenza yang dapat ditangani antara lain demam, sakit kepala, batuk, pilek, hidung tersumbat, nyeri otot, dan sakit tenggorokan.

Namun, manfaat obat ini tidak sama pada setiap pasien. CDC menyebutkan antivirus influenza bekerja paling baik apabila diberikan dalam satu hingga dua hari pertama setelah gejala muncul.

Oseltamivir juga berbeda dengan antibiotik. Antibiotik digunakan untuk menangani infeksi bakteri, sedangkan oseltamivir bekerja terhadap virus influenza. Karena itu, obat ini tidak bisa digunakan untuk mengatasi semua jenis infeksi saluran pernapasan.

Tidak Semua Flu Butuh

Salah satu hal yang perlu dipahami masyarakat adalah tidak semua orang yang mengalami influenza membutuhkan obat antivirus.

Konsultan Pulmonologi Intervensi dan Kegawatdaruratan Napas, dr. Pompini Agustina Sitompul, SpP, menjelaskan bahwa oseltamivir tidak diindikasikan untuk common cold atau pilek biasa. Penggunaannya lebih dipertimbangkan pada pasien dengan influenza berat maupun kelompok rentan yang berisiko mengalami komplikasi.

Pada pasien dengan kondisi berat, misalnya mengalami sesak napas hingga membutuhkan bantuan oksigen, antivirus dapat menjadi bagian dari penanganan medis. Sementara itu, ahli farmakologi Dr. dr. Dewi Selvina Rosdiana, M.Kes, menyoroti manfaat oseltamivir pada

pasien influenza ringan tanpa komplikasi. Menurutnya, bukti penelitian belum menunjukkan manfaat klinis yang bermakna dalam memperpendek durasi sakit pada anak-anak yang menjalani rawat jalan dengan influenza tanpa komplikasi.

Ia menggambarkan perbedaan waktu pemulihan antara kelompok anak yang mendapatkan oseltamivir dan kelompok yang menerima plasebo relatif kecil. Dalam ilustrasinya, kelompok yang menggunakan antivirus mungkin sembuh pada pagi hari, sedangkan kelompok plasebo baru pulih pada malam hari.

"Artinya berdasarkan bukti yang ada saat ini studi meta-analisis ini dilakukan pada 2.500 sekian pasien anak yang sakit dengan influenza tanpa komplikasi yang dengan rawat jalan, ini belum terdapat bukti yang cukup kuat bahwa oseltamivir memberikan manfaat klinis yang bermakna dalam memperpendek lama sakit," kata Dewi.

Temuan tersebut menjadi pengingat bahwa pemberian antivirus harus mempertimbangkan manfaat dan risiko bagi pasien, bukan semata-mata karena seseorang mengalami gejala flu. CDC dalam panduan klinis terbarunya pada 10 Maret 2026 merekomendasikan pemberian antivirus sesegera mungkin kepada pasien yang dirawat di rumah sakit, mengalami influenza berat atau progresif, serta kelompok berisiko tinggi mengalami komplikasi.

Pengobatan idealnya tidak menunggu hasil pemeriksaan laboratorium pada kelompok pasien tersebut apabila dokter telah memiliki dugaan klinis influenza yang kuat.

CDC juga menjelaskan bahwa manfaat antivirus paling optimal ketika diberikan dalam 48 jam pertama sejak gejala muncul. Namun, pada pasien yang mengalami kondisi berat dan harus dirawat di rumah sakit, pengobatan masih dapat memberikan manfaat meskipun dimulai setelah 48 jam. Manfaat oseltamivir pada pasien influenza ringan memang masih menjadi pembahasan dalam

dunia medis. Badan kesehatan dunia WHO melalui Clinical Practice Guidelines for Influenza yang diterbitkan pada 12 September 2024 memberikan rekomendasi bersyarat penggunaan oseltamivir pada pasien influenza berat. Sebaliknya, penggunaan antivirus tidak dianjurkan secara rutin pada pasien influenza nonberat dengan risiko komplikasi rendah.

Sementara itu, CDC Amerika Serikat memiliki rekomendasi lebih luas, terutama untuk pasien yang masuk kelompok berisiko tinggi, pasien dengan kondisi progresif, dan mereka yang membutuhkan perawatan rumah sakit.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keputusan pemberian antivirus perlu mempertimbangkan tingkat keparahan penyakit, faktor risiko, serta pedoman klinis yang digunakan.

Jangan Minum Antivirus Sembarangan

Di tengah kekhawatiran mengenai kelangkaan oseltamivir, masyarakat perlu memahami bahwa obat antivirus bukan produk yang dapat dikonsumsi untuk berjaga-jaga tanpa pemeriksaan medis.

Penggunaan obat tanpa indikasi yang tepat bukan hanya berisiko menimbulkan efek samping, tetapi juga berpotensi meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan obat bagi pasien yang benar-benar membutuhkannya.

Kemenkes mengingatkan bahwa penggunaan antivirus yang tidak tepat juga dapat meningkatkan risiko munculnya resistensi virus.

Kondisi tersebut dapat mengurangi efektivitas obat dalam menangani infeksi apabila virus mengalami perubahan yang membuatnya tidak lagi responsif terhadap pengobatan.

Bagi masyarakat yang mengalami gejala influenza tanpa tanda bahaya, Kemenkes menyarankan istirahat cukup, menjaga asupan cairan, dan memantau perkembangan kondisi tubuh. Jika muncul gejala berat, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan. (far/ist/dya)



Penjelasan Ilmiah Gunung Papandayan Keluarkan Blue Fire



Gunung Papandayan di Kabupaten Garut, Jawa Barat, kembali memperlihatkan fenomena alam yang menarik perhatian: api berwarna biru atau blue fire. Fenomena tersebut muncul di sekitar kawasan fumarol aktif dan membuat jalur pendakian serta area perkemahan sempat ditutup sementara.

Sekilas, nyala biru itu tampak seperti api biasa yang memiliki warna berbeda. Namun secara ilmiah, blue fire di gunung api berkaitan dengan keluarnya gas vulkanik dari rekahan bumi. Dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University Sonni

Setiawan menjelaskan, fenomena tersebut terjadi akibat pembakaran gas belerang yang keluar melalui rekahan vulkanik.

Menurut Sonni, magma di bawah Gunung Papandayan melepaskan sejumlah gas, di antaranya hidrogen sulfida (H_2S) dan sulfur dioksida (SO_2). Gas-gas tersebut keluar melalui rekahan fumarol atau solfatara dengan suhu sekitar 200-600 derajat Celsius. Fumarol merupakan lubang atau rekahan di kawasan gunung api yang menjadi jalur keluarnya gas dan uap panas ke atmosfer. Ketika gas H_2S yang keluar dari rekahan tersebut bertemu dengan oksigen di udara, terjadi reaksi

pembakaran. Proses inilah yang menghasilkan panas, uap air, sulfur dioksida, sekaligus nyala api berwarna biru.

Warna biru elektrik pada api bukan karena gasnya memiliki warna biru. Warna tersebut berkaitan dengan proses pembakaran gas belerang pada temperatur tinggi. Suhu nyala api bahkan dapat mencapai sekitar 600 derajat Celsius.

Fenomena tersebut terutama terlihat di sekitar fumarol aktif, antara lain Blok Mas dan kawasan Golden Sunrise. Pada malam hari, blue fire lebih mudah diamati karena

cahaya lingkungan jauh lebih rendah. Kemunculannya disebut paling terlihat sekitar pukul 02.00 hingga 05.00 WIB, ketika kondisi benar-benar gelap.

Papandayan sebenarnya bukan baru kali ini menghasilkan fenomena tersebut. Aktivitas blue fire telah tercatat setelah erupsi pada November 2002. Erupsi tersebut membuka sejumlah rekahan baru di kawasan Kawah Mas, Kawah Baru, dan Nangklak.

Sonni menjelaskan, terbentuknya rekahan baru membuat gas vulkanik yang sebelumnya menyebar menjadi lebih terkonsentrasi pada celah-celah sempit. Gas dengan tekanan lebih tinggi kemudian bertemu udara dan dapat terbakar sehingga menghasilkan nyala biru.

Fenomena blue fire juga berkaitan dengan dinamika aktivitas vulkanik. Berdasarkan catatan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), aktivitas Gunung Papandayan mengalami peningkatan. Indikasinya antara lain peningkatan aliran SO_2 dan aktivitas gempa vulkanik dangkal.

Selain itu, suhu fumarol yang sebelumnya berada di kisaran 150 derajat Celsius meningkat menjadi sekitar 300-400 derajat Celsius. Dalam kondisi temperatur tersebut, gas H_2S dapat terbakar secara spontan tanpa perlu disulut api dari luar. Kondisi ini membuat kemunculan blue fire lebih sering terlihat.

Meski menarik secara visual, blue fire bukan fenomena yang aman untuk didekati. Gas vulkanik yang menyertainya, termasuk SO_2 , dapat membahayakan sistem pernapasan. Area di sekitar fumarol juga memiliki temperatur tinggi dan struktur tanah yang dapat menjadi rapuh. (farist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **SIDOARJO:** TEGUH A | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** AIS | **JOMBANG:** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **TRENGGALEK:** HERLAMBAANG | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, FADHILA | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Trend Rambut Pendek Artis Korea Copper Bob hingga Blonde Pixie

Tren rambut pendek kembali mencuri perhatian lewat penampilan sejumlah aktris Korea Selatan. Mulai dari short layered bob, micro bob, hingga potongan cepak bernuansa maskulin, gaya rambut mereka menawarkan inspirasi bagi perempuan yang ingin tampil lebih segar, modern, dan berkarakter.

Potongan rambut pendek bukan sekadar pilihan untuk tampil praktis. Dalam dunia kecantikan dan fashion Korea, perubahan gaya rambut juga menjadi bagian dari pembentukan karakter dan identitas penampilan. Permainan panjang potongan, tekstur, layer, hingga warna rambut membuat model pendek memiliki banyak variasi, mulai dari feminin dan elegan hingga edgy dan boyish.

Sejumlah aktris Korea pun memperlihatkan bagaimana satu perubahan gaya rambut dapat menghadirkan kesan yang berbeda. Lee Se Young memilih nuansa copper brown, Nana mempertahankan karakter rambut pendek dengan micro bob, sementara Han So Hee tampil berani dengan warna pirang.

Lee Se Young: Short Layered Bob

Setelah cukup lama mempertahankan rambut panjang, Lee Se Young tampil dengan potongan short layered bob bernuansa copper brown. Perpaduan potongan berlapis dan warna cokelat tembaga memberikan kesan hangat sekaligus elegan. Layer pada rambut membuat tampilannya tidak terkesan monoton. Warna copper brown juga memberikan dimensi pada rambut sehingga terlihat lebih hidup ketika terkena cahaya. Gaya ini cocok bagi perempuan yang ingin mencoba rambut pendek tanpa meninggalkan kesan feminin.

Seol In Ah – Cepak yang Maskulin

Berbeda dari gaya rambut pendek yang identik dengan kesan feminin, Seol In Ah justru tampil dengan potongan sangat pendek atau cepak. Sebelumnya, aktris ini cukup lama mempertahankan gaya wolf cut selama sekitar tiga tahun. Transformasi tersebut dilakukan untuk mendalami karakter Kang Jae Hee dalam drama *Love in Disguise*. Berdasarkan pemberitaan, drama produksi tvN tersebut dijadwalkan tayang perdana pada 19 Oktober 2026.

Dalam cerita, Seol In Ah memerankan mantan perwira pasukan khusus yang menyamar sebagai

sekretaris laki-laki untuk menjalankan penyelidikan rahasia. Potongan rambut pendek menjadi bagian penting dari perubahan penampilannya.

Gaya cepak ini memperlihatkan karakter rambut pendek yang lebih berani, tegas, dan cenderung androgini. Sebelumnya, penampilan Seol In Ah dengan potongan pixie cut juga menarik perhatian ketika menghadiri Baeksang Arts Awards 2026.

Kim Yoo Jung – Short Bob Elegan

Kim Yoo Jung memilih potongan short bob yang memberikan kesan dewasa, rapi, dan berkelas. Panjang rambut yang berada di sekitar rahang membuat garis wajah terlihat lebih tegas, tetapi tetap mempertahankan kesan lembut.

Model bob seperti ini termasuk gaya yang fleksibel. Rambut bisa ditata lurus untuk menghasilkan tampilan minimalis dan profesional, atau diberi sedikit lekukan pada ujungnya untuk menciptakan kesan lebih feminin.

Penampilan tersebut hadir menjelang perannya dalam drama *100 Days of Deception*. Netflix mencatat Kim Yoo Jung sebagai salah satu pemeran utama bersama Park Jin Young dan Kim Hyun Joo dalam serial yang mengambil latar era kolonial Jepang di Gyeongseong.

Nana – Micro Bob yang Edgy

Nana kembali memperlihatkan pesona rambut pendek melalui potongan micro bob. Berbeda dengan bob klasik yang biasanya memiliki panjang hingga dagu atau mendekati bahu, micro bob dipotong lebih tinggi, tepat di sekitar atau sedikit di bawah telinga. Potongan ini membuat area leher terlihat lebih terbuka dan memberikan aksen kuat pada garis rahang. Kesan yang muncul cenderung modern, tegas, sekaligus edgy.

Nana termasuk aktris yang cukup sering bereksperimen dengan rambut pendek. Variasi panjang dan tekstur membuat penampilannya tidak selalu terlihat sama meskipun menggunakan model dasar bob.

Micro bob juga menjadi salah satu potongan rambut yang mendapat perhatian dalam tren kecantikan internasional 2026. Majalah *Who What Wear* menyoroti popularitas potongan ini karena mudah dikreasikan, baik dengan tampilan lurus dan rapi maupun sedikit bertekstur.

Han So Hee – Pendek Warna Blonde

Han So Hee kembali melakukan transformasi penampilan melalui rambut pendek yang dipadukan dengan warna pirang atau blonde. Perubahan ini memberikan karakter berbeda dibandingkan penampilannya yang selama ini sering identik dengan rambut gelap. Warna blonde menghadirkan kesan lebih berani, modern, dan mencolok. Ketika dipadukan dengan potongan pendek, penampilannya terasa lebih edgy dan kuat.

Transformasi tersebut berkaitan dengan keterlibatannya dalam serial live action *Solo Leveling* produksi Netflix. Serial adaptasi karya Chugong itu juga dibintangi Byeon Woo Seok dan Kang You Seok. Proses produksinya dilaporkan telah berlangsung pada September 2026. (farist/dya)



SESAK APBN KITAdari Hal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mencatat defisit Rp319 triliun hingga akhir September. Angka tersebut setara 1,24 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pada saat yang sama, pemerintah mulai mengerem belanja Kementerian dan lembaga untuk menjaga defisit tahunan tetap di bawah batas 3 persen PDB.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan defisit tersebut merupakan konsekuensi dari desain APBN yang sejak awal memang disusun lebih besar pada sisi belanja dibandingkan pendapatan. "Defisit APBN di angka Rp319,0 triliun dan defisit 1,24 persen dari PDB. Memang APBN kita dari sejak awal didesain untuk defisit, artinya kita desain supaya belanja negara bisa lebih tinggi dari apa yang kita kumpulkan dari masyarakat, pendapatan negara," kata Suahasil dalam Investor Daily Summit di Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Hingga akhir September, pendapatan negara mencapai Rp2.341,5 triliun atau 74,2 persen dari target. Sementara belanja negara sudah mencapai Rp2.660,5 triliun atau sekitar 69 persen dari pagu. Selisih antara penerimaan dan belanja itulah yang membentuk defisit Rp319 triliun. Suahasil menilai realisasi tersebut masih berada dalam jalur yang direncanakan karena September merupakan tiga perempat perjalanan tahun anggaran.

"Rp2.341,5 triliun, 74,2 persen dari target. Akhir September itu adalah 3/4 tahun, jadi kalau pendapatan sudah terkumpul 74 persen, artinya on track. Belanja negara sudah dibelanjakan Rp2.660,5 triliun, ini adalah 69 persen relatively on track. Tentu nanti akan ada percepatan belanja terutama di bulan November dan di bulan Desember," ujar Suahasil.

Di sisi lain, pemerintah tidak mengabaikan tekanan terhadap ruang fiskal. Proyeksi terbaru menempatkan defisit APBN hingga akhir 2026 sebesar 2,85 persen PDB, naik dari target awal 2,68 persen. Angka tersebut menyisakan ruang yang tipis sebelum menyentuh batas defisit 3 persen PDB.

Karena itu, Suahasil menginstruksikan Kementerian dan lembaga memangkas 30 persen anggaran perjalanan dinas yang masih tersisa pada 2026 serta membekukan belanja non-esensial. Pemerintah juga meminta aparat mengutamakan rapat secara daring, menghentikan pengadaan kendaraan baru, serta menunda pembangunan dan renovasi rumah dinas maupun gedung pemerintahan. Usulan pemangkasan harus disampaikan kepada Kementerian Keuangan paling lambat 16 Oktober.

Kebijakan penghematan tersebut diarahkan agar tidak mengganggu pelayanan publik dan tetap menopang program prioritas pemerintah. Salah satu sumber yang mengetahui kebijakan tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa langkah itu ditempuh untuk menjaga defisit tetap di bawah 3 persen PDB.

Meski defisit melebar, APBN hingga September masih mencatat keseimbangan primer positif sebesar Rp125,5 triliun. Posisi ini menunjukkan penerimaan negara setelah dikurangi belanja, di luar pembayaran bunga utang, masih berada dalam posisi surplus. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan surplus keseimbangan primer pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Suahasil menegaskan pemerintah tetap berupaya menjaga kredibilitas APBN sembari menggunakan anggaran sebagai instrumen pertumbuhan dan perlindungan masyarakat. "Angka-angkanya kita jaga sehingga dapat dipercaya bahwa APBN ini adalah APBN yang mengumpulkan uang dari rakyat namun juga belanjanya kembali lagi kepada masyarakat Indonesia," katanya.

Tekanan fiskal itu berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi kenaikan harga energi global yang berpotensi meningkatkan kebutuhan subsidi pada kuartal terakhir tahun ini. Ruang gerak fiskal menjadi semakin terbatas ketika belanja harus tetap dipercepat pada November dan Desember, sementara pemerintah pada saat yang sama berusaha mempertahankan defisit di bawah ambang 3 persen.

Namun, pemerintah optimistis laju perekonomian Indonesia akan semakin menguat pada paruh kedua 2026. Menteri Keuangan Suahasil Nazara memperkirakan pertumbuhan ekonomi semester II 2026 berada di kisaran 5,5% hingga 5,6%.

Proyeksi tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I 2026 yang tercatat sebesar 5,45%.

"Pertumbuhan ekonomi 5,45% itu di semester I/2026. Lalu kemudian semester II ini kami yakin bahwa bisa tumbuh di sekitar 5,5% sampai dengan 5,6%," ujar Suahasil.

Keyakinan Konsumen Turun

Gambaran fiskal tersebut berjalan beriringan dengan perubahan sentimen rumah tangga. Survei Konsumen Bank Indonesia menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) September 2026 turun tipis menjadi 118,1 dari 118,5 pada Agustus. Namun, BI masih menempatkan indeks tersebut dalam zona optimistis karena berada di atas 100.

Penurunan terutama terlihat

pada Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE), dari 109,4 menjadi 107,5. Sebaliknya, Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) justru naik dari 127,6 menjadi 128,7. Artinya, persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini sedikit melemah, sementara harapan terhadap kondisi ekonomi ke depan masih menguat.

BI menyebut keyakinan konsumen tetap terjaga. Ekspektasi terhadap pendapatan dan ketersediaan lapangan kerja juga masih menunjukkan optimisme. Pada September, indeks ekspektasi pendapatan meningkat menjadi 136,9 dari 134,9, sedangkan ekspektasi ketersediaan lapangan kerja naik menjadi 127,7 dari 125,7.

Di tingkat rumah tangga, porsi pendapatan yang digunakan untuk konsumsi meningkat menjadi 74,9 persen dari 74,2 persen. Sebaliknya, porsi untuk tabungan turun menjadi 15,4 persen dari 15,8 persen, sedangkan pembayaran cicilan utang berada di 9,7 persen. Data tersebut menunjukkan konsumen masih optimistis, tetapi ruang pengelolaan pendapatan rumah tangga ikut berubah.

Fenomena Downgrading

Fenomena downgrading atau pengeseran pilihan konsumsi ke barang dan layanan yang lebih murah mulai terlihat dalam perilaku rumah tangga. Sebagian masyarakat mengurangi pembelian barang mewah, plesiran, hingga makan di luar dan beralih ke produk dengan harga lebih rendah. Perubahan itu dinilai bukan sekadar soal gaya hidup, melainkan respons rumah tangga menghadapi ketidakpastian ekonomi.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Wisnu Setiadi Nugroho, mengatakan rumah tangga berusaha mempertahankan konsumsi inti seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. Pengeluaran yang lebih fleksibel atau bersifat tersier menjadi bagian yang dikurangi ketika ruang keuangan semakin terbatas.

"Downgrading atau dikenal juga sebagai sachtization, downsizing ini saya lihat sebagai respons rasional rumah tangga terhadap ketidakpastian ekonomi, bukan pilihan gaya hidup," ujar Wisnu.

Dalam teori ekonomi, kata Wisnu, pola tersebut dikenal sebagai consumption smoothing. Rumah tangga berupaya menjaga konsumsi kebutuhan utama tetap relatif stabil dengan mengorbankan pengeluaran yang lebih fleksibel. Karena itu, penyesuaian konsumsi tidak selalu berarti masyarakat sekadar ingin berhemat, melainkan menunjukkan semakin terbatasnya pilihan dalam mengatur pengeluaran.

Persoalan yang perlu diperhatikan, menurut Wisnu, bukan semata-mata praktik downgrading, tetapi seberapa luas fenomena tersebut terjadi dan

kelompok masyarakat yang mengalaminya. Jika hanya terjadi pada sebagian kecil rumah tangga, perubahan tersebut masih dapat dianggap sementara. Namun, situasinya berbeda jika meluas ke kelas menengah yang memiliki kontribusi besar terhadap konsumsi nasional.

"Kalau fenomena ini meluas, terutama di kelas menengah yang menyumbang porsi besar terhadap konsumsi nasional, itu seharusnya jadi alarm bahaya bagi pemerintah," kata Wisnu.

Wisnu mengidentifikasi dua faktor utama yang mendorong downgrading. Pertama, pendapatan riil yang stagnan ketika harga kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan energi meningkat. Kondisi tersebut membuat kemampuan belanja riil rumah tangga menyusut meskipun pendapatan nominal tidak berubah. Kedua, menurunnya ekspektasi terhadap kondisi ekonomi mendatang, termasuk kekhawatiran terhadap keamanan pekerjaan.

Perubahan itu tercermin dalam pola trade down, seperti perpindahan dari merek premium ke merek ekonomis dan meningkatnya pilihan terhadap pasar barang bekas. "Dua faktor ini terlihat jelas di pola trade down yang terjadi, yakni perpindahan dari merek premium ke merek ekonomis, serta maraknya pasar barang bekas. Pola ini menunjukkan bahwa anggaran belanja riil masyarakat memang menyusut, bukan sekadar berhemat temporer menjelang satu momen tertentu," ungkapnya.

Meski demikian, downgrading tidak otomatis menunjukkan penurunan kesejahteraan. Penyesuaian konsumsi dapat terjadi karena kebutuhan rumah tangga berubah, misalnya ketika anak telah mandiri atau seseorang memasuki masa pensiun. Tekanan ekonomi lebih terlihat ketika rumah tangga usia produktif dengan struktur keluarga yang masih sama harus menurunkan kualitas konsumsi karena keterbatasan anggaran.

"Yang tidak wajar adalah ketika downgrading terjadi pada individu atau rumah tangga yang komposisinya masih utuh dan berada di usia produktif. Di situ downgrading bukan lagi soal preferensi yang berubah, melainkan dipaksa oleh keterbatasan anggaran," jelas Wisnu.

Ia mengingatkan, jika tekanan daya beli berlangsung lama dan rumah tangga mulai berutang atau menjual aset untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kondisi tersebut menunjukkan bantalan keuangan mulai habis.

"Ketika rumah tangga sampai menjual aset untuk menutup kebutuhan sehari-hari, ya itu juga tanda bahwa bantalan keuangan mereka sudah habis. Bukan lagi soal mengatur ulang prioritas belanja, tapi soal bertahan hidup," kata Wisnu. (wid,ist,ktn,kum/dya)



DPRD SURABAYA DUKUNG BOPDA UNTUK 117 PONPES

Laila Mufidah Sebut Kesetaraan Hak Pendidikan, Ingatkan Payung Hukum

SURABAYA— Rencana perluasan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) untuk pondok pesantren (ponpes) di Surabaya mendapat dukungan Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah.

Namun, ia mengingatkan agar penyaluran bantuan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas. Sehingga ke depan tidak menimbulkan persoalan dalam penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Menurut Laila, perluasan BOPDA merupakan upaya menyelaraskan hak pendidikan bagi santri dengan siswa di lembaga pendidikan formal. Meski demikian, mekanisme penyalurannya harus disusun secara cermat, mengingat pondok pesantren berada dalam pembinaan Kementerian Agama (Kemenag).

"Perluasan bantuan BOPDA ini sebagai ikhtiar Surabaya dalam rangka menyelaraskan hak pendidikan bagi santri di Surabaya," kata Laila, Kamis (8/10/2026).

Politisi PKB tersebut menuturkan, setiap penggunaan APBD harus berlandaskan asas kepatutan, kemanfaatan, dan kepatuhan terhadap regulasi. Karena itu, Pemkot Surabaya perlu memastikan payung hukum penyaluran BOPDA kepada ponpes sebelum program direalisasikan.

Ia juga mengingatkan agar skema bantuan untuk lembaga pendidikan tidak rancu dengan bantuan yang diberikan kepada siswa berdasarkan status kependudukan sebagai warga Surabaya.

Menurutnya, legalitas penyaluran, ketepatan sasaran, serta kesiapan manajemen dan administrasi keuangan internal ponpes perlu menjadi pertimbangan utama. "Dengan begitu, bantuan yang bersumber dari APBD dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar memberikan manfaat bagi penerima," ucapnya.

Mulai 2027, Rp 150.000/Bulan

Berdasarkan data perencanaan pembangunan daerah, perluasan alokasi BOPDA ditargetkan menyasar sekitar 117 ponpes di Surabaya. Jumlah tersebut mengacu pada data Kemenag.

Saat ini, Pemkot Surabaya melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) tengah mengintensifkan sinkronisasi dan pemadanan data antara Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan Education Management Information System (EMIS) milik Kemenag.

Laila menilai, perluasan bantuan tersebut berpotensi memperluas akses dukungan pendidikan bagi santri, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Bantuan



Pondok pesantren Sunan Kalijogo yang berlokasi di Simo Kalangan, Surabaya. (Amanah/Lentera)

operasional diharapkan dapat meringankan beban keluarga sekaligus mengurangi risiko santri terkendala biaya dalam menempuh pendidikan.

Ia menambahkan, pemberian bantuan juga perlu diikuti peningkatan tata kelola lembaga penerima. Ponpes harus memiliki administrasi yang tertib dan memenuhi ketentuan pertanggungjawaban penggunaan dana.

"Lebih dari itu, akan mendorong modernisasi manajemen pesantren. Agar memenuhi syarat kepatuhan hukum penerimaan BOPDA, ponpes didorong untuk meningkatkan kualitas administrasinya," tuturnya.

Terkait BOPDA khusus santri di Surabaya yang akan digulirkan mulai 2027, Saat ini Pemkot dan DPRD tengah mematangkan program strategis tersebut. Nantinya, setiap santri yang memenuhi syarat direncanakan menerima bantuan sebesar Rp150.000 per bulan.

"Kami masih menunggu skema terbaik. Apakah dengan mekanisme Bopda untuk Ponpes dengan sasaran santri. Atau pemberian beasiswa kepada setiap santri yang memenuhi syarat," ucapnya.

Sebelumnya, Pemkot Surabaya akan memperluas jangkauan BOPDA hingga menyasar para santri di pondok pesantren serta siswa di sekolah kerohanian non-formal/keagamaan lainnya pada tahun anggaran mendatang.

Bantuan tersebut nantinya diberikan senilai Rp150.000 per bulan, menyesuaikan besaran nilai standar BOPDA. Saat ini, Dinas Pendidikan (Dispendik) tengah melakukan verifikasi data penerima melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, langkah ini diambil setelah

kami ditugaskan untuk melakukan mapping menyeluruh," jelasnya.

Terkait skema BOPDA yang akan dijalankan di Pondok Pesantren, Febri mengungkapkan, pada dasarnya bantuan ini ditujukan untuk seluruh santri yang menempuh pendidikan di pondok pesantren.

"Mekanismenya sama seperti sekolah swasta formal, di mana sekolah/lembaga yang sudah sangat mampu secara finansial biasanya secara sukarela tidak mengambil alokasi tersebut. Namun, bagi pondok-pondok pesantren umum yang membutuhkan, fasilitas ini akan disalurkan," ungkapnya.

Meski demikian, jangkauan bantuan ini diprioritaskan bagi pondok pesantren yang berada di wilayah Kota Surabaya. Pemkot Surabaya berkoordinasi langsung dengan Kementerian Agama (Kemenag) untuk pendataan pesantren lokal.

"Kalau pondoknya di luar Surabaya, tentu jangkauannya beda dan orang tua biasanya sudah memiliki pertimbangan tersendiri. Yang kita utamakan adalah pondok-pondok di Surabaya yang kasat mata dan memang harus kita bantu," tambahnya.

Terkait waktu pelaksanaan dan besaran alokasi dana, saat ini pihaknya sedang menghitung estimasi kebutuhan anggaran berdasarkan jumlah santri hasil pemadanan data penduduk. Hasil perhitungan tersebut nantinya diajukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dibahas bersama.

"Kami sedang merencanakan dan menggodok hal tersebut secara matang. Harapannya, setelah proses perhitungan dan pembahasan anggaran selesai, program ini bisa segera direalisasikan untuk memfasilitasi anak-anak kita yang ada di pondok pesantren," tutupnya. (adv/ama/dya)

pihaknya menemukan adanya penurunan jumlah siswa saat data lulusan SD dicocokkan dengan data pendaftar jenjang SMP di Dapodik.

"Saya sudah sampaikan, cek data dari Dapodik. Yang lulus SD setelah masuk SMP kok berkurang, ke mana mereka? Ternyata ada di pondok pesantren. Maka dari itu, kalau mereka masuk dalam kriteria warga yang berhak dibantu, BOPDA-nya harus tetap diberikan," kata Eri, Rabu (30/9/2026).

Eri menuturkan, skema penyerahan bantuan tidak terbatas untuk pondok pesantren saja, tetapi juga mencakup lembaga pendidikan kerohanian lain, seperti sekolah keagamaan Kristen bagi keluarga kurang mampu.

"Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada anak di Kota Surabaya yang terkendala menempuh pendidikan, baik di sekolah formal maupun lembaga keagamaan," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dispendik Kota Surabaya, Febrina Kusumawati menjelaskan setelah dilakukan penyepadanan dan evaluasi data, sebagian besar anak-anak asal Kota Surabaya yang tidak terdeteksi di sekolah formal ternyata mengenyam pendidikan di pondok-pondok pesantren.

"Pak Wali Kota ingin memastikan bahwa seluruh anak Kota Surabaya mengenyam pendidikan sesuai standar. Kalau di luar (sekolah formal) ada BOS dan BOPDA, maka anak-anak kita yang ada di pondok pesantren pun harus mendapatkan fasilitas yang sama. Selama ini mungkin belum secara menyeluruh terfasilitasi oleh Pemkot, sehingga

LAILA MUFIDAH

Wakil Ketua DPRD Surabaya